

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja keuangan sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan:

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaifi (2019), dari jurnal Profit Universitas Brawijaya 13, tentang pengaruh *Good Corporate Governance*, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independent dan kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE, namun Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROE dan terdapat hubungan positif signifikan antara dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap ROA.

Pada Penelitian Agus Santoso (2017), pada jurnal Prosiding Seminar nasional dan *Call for paper* ekonomi dan bisnis, tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, *good corporate governance* yang diwakili dengan Proxy kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara langsung signifikan positif terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak langsung signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.

Pada Penelitian Eva Iswandari et all (2016) penelitian tersebut tentang *The effect profit management in financial of manufacturing company with good corporate governance as a moderating variabel listed in Indonesia security exchange*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengujian dengan menggunakan asumsi klasik dan uji gletser dengan tingkat signifikant 5% menggunakan program SPSS versi 22, menunjukkan bahwa GCG berpengaruh

terhadap kinerja keuangan dan GCG mempengaruhi hubungan antara manajemen laba dan kinerja keuangan.

Menurut penelitian Resi zarvina et all (2017) tentang pengaruh IFR dan mekanisme CG terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba sebagai variabel intervening dalam jurnal ekonomi, hasil menunjukkan bahwa variabel *Content*, *Timeliness*, *technology*, kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas laba, secara langsung berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan user support tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan, dan *variabel content*, *times lines*, *technology*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laba, serta *variabel Content*, *Timeliness*, *technology*, kepemilikan institusional, komisaris independent dan komite audit berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kualitas laba, sedangkan user support dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan melalui kualitas laba sebagai variabel intervening.

Menurut penelitian Mochammad Feries Gurdyanto pada jurnal *research Fair Unisri* (2019) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufacture sector industry barang konsumsi sub sector makanan dan minuman menunjukkan bahwa fariabel *dept to equity ratio* berpengaruh terhadap kinerja kuangan perusahaan, sedangkan variabel dewan direksi, proporsi dewan komisaris independent, kepemilikan manajerial, institusional, *ownership* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian Astri Spriyaningsih dan Amanita Novi Yushita pada jurnal *Profita* edisi 4 tahun 2016, tentang pengaruh penerapan *good corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan menyimpulkan bahwa dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaam berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja kuangan, sedangkan dewan komisaris independent dan kepemilikan manajerial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut penelitian Cross Oghi Daniel (2019) dari jurnal Management dan Ekonomi tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas dan kinerja keuangan organisasi, menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan berperan sebagai kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup lembaga perbankan, pertumbuhan pemerintah dan keberhasilan perdagangan dan industry bergantung pada peran intermediasi keuangan yang dimainkan oleh sector perbankan.

Menurut penelitian Ilham Ciftci et al (2019) pada *internasional business Review* 28, tentang *corporate governance and firm performance in emerging markets evidence from turkey*, menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga menyebabkan kinerja keuangan perusahaan lebih baik, karena pemilik lebih berkonsentrasi dalam perusahaan, selain itu resiko resiko yang akan dialami perusahaan dapat ditanggung bersama, dan kepemilikan silang tidak akan mempengaruhi kinerja pasar, tetapi hal tersebut dikaitkan secara negative dengan kinerja akuntansi.

Berdasarkan penelitian Tajudeen J. Ayoola dan Ome eye O. Olanmi pada *Issues in social and environmental Accounting* (2013), tentang *Nussiness case for intergrated reporting in the Nigerian Oil and gas sectore* menyimpulkan bahwa untuk mengatasi pelaporan *Corporate social responsibility* dan laporan *good corporate governance* yang tidak terkait dengan kegiatan inti perusahaan dan tidak akan terintegrasi oleh strategi bisnis perusahaan. Sehingga pelaporan terintegrasi dapat merampingkan pelaporan kinerja keuangan perusahaan yang akan sejalan dengan praktik kerja terbaik di sector tersebut.

Berdasarkan penelitian Wehdawati et al (2015) pada jurnal wawasan manajemen vol 3 tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufacture, menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negative significant terhadap ROA, dan ROE. Jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE, dan variabel jumlah komite audit tidak digunakan dalam analisis karena data bernilai konstant.

Menurut penelitian Maya sari (2018) dalam prosiding “*The national Conference Management and Bussines* (NCMAB) menyimpulkan bahwa *scor good corporate governance* yang meningkat belum mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan PT Perkebunana Nusantara IV (Persero) Medan yang diukur dengan Rasio Provivalitas, Likuiditas dan Aktivitas selama tahun 2011-2015, karena pada tahun tersebut kinerja keuangan yang diperoleh perusahaan masih dibawah standar BUMN yang dilihat dari profibilitas, namun untuk rasio likuiditas dan aktivitasnya yang dilihat dari *Curent Ratio*, *Cash Ratio*, TATO, CP, PP dan TMS hanya *Cash Ratio*, PP dan TMS yang sudah memenuhi standar yang di tentukan BUMN.

Menurut penelitian Freisca Fresillia dan Raisa Pratiwi tentang pengaruh *Good corporate Governance*, Likuiditas dan Ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan BUMN yang termasuk dalam IICG dengan struktur modal sebagai variabel intervening, menyimpulkan bahwa struktur modal memediasi secara penuh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas namun, memediasi parsial likuiditas terhadap profitabilitas.

## **2. 2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Corporate Governance**

*Corporate governace* atau sering disebut tata kelola perusahaan merupakan suatu cara atau system atau mekanisme yang mempengaruhi suatu keputusan yang akan diambil oleh seorang pimpinan ketika terjadi kejadian antara pemisahan kepemimpinan dan pengendalian, ada 5 mekanisme dalam *corporate governance* yaitu: kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit, kelima hal tersebut dapat digunakan untuk menghindari konflik keagenan yang sering terjadi di perusahaan, Santoso (2017)

Berdasarkan peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance*, Bahwa setiap lembaga atau badan usaha milik Negara wajib menerapkan praktik *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas perusahaannya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan yang berfungsi

untuk mewujudkan nilai para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam nilai-nilai etika.

Pengertian lain menurut BPK RI (2017) *Good corporate governance* adalah komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan selain itu tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan di suatu perusahaan, para pemangku kepentingan tersebut secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pelaku utama tata kelola perusahaan adalah para pemegang saham. Dewan direksi, dan manajemen. Tata kelola perusahaan atau sering disebut *good corporate governance* merupakan mekanisme yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan, agar operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dari para Stakeholder atau para pemangku kepentingan.

Penerapan *good corporate governance* harus didukung dengan sarana dan prasarana selain itu, *corporate governance* harus dilakukan berdasarkan asas asas corporate governance, asas tersebut terdiri dari 5 point penting (Setyawan et al, 2016) yaitu:

1) Keterbukaan / *Transparacy*

Untuk menjaga objektivitas di perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan dituntut harus bisa menyediakan informasi yang material dan relevan dengan keadaan perusahaan. Dan informasi tersebut harus mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

2) Kejelasan / *Accountability*

Perusahaan diwajibkan untuk selalu bisa mempertanggung jawabkan kinerja perusahaan secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

3) Pertanggung jawaban / *Responsibility*

Perusahaan wajib menaati dan mematuhi peraturan perundang undangan serta harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan sehingga, dapat terpelihara kesinambungan usaha, prinsip akuntabilitas diterapkan pada saat pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana jangka panjang perusahaan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS tahunan.

4) Tidak memihak / *Independency*

Untuk menunjang penerapan *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara professional atau secara independen sehingga masing masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan kesetaraan / *fairness*

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Agar tidak ada pihak yang saling berspekulasi.

*Mekanisme corporate governance* merupakan serangkaian acuan yang digunakan untuk manajemen ketika akan mengambil suatu keputusan, ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Setyawan et al. 2016) *mekanisme corporate governance* yang bagus adalah salah satu element utama perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan perbaikan hubungan antara berbagai pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Thussakdiah et al, 2016)

Menurut Santoso (2017) *mekanisme Corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi suatu keputusan yang akan diambil oleh seorang pimpinan ketika terjadi pemisahan antara kepemimpinan dan pengendalian, ada 5 mekanisme dalam *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit, kelima hal tersebut dapat digunakan untuk menghindari konflik keagenan yang sering terjadi di perusahaan.

Menurut Effendi Arief dalam the power of corporate governance teori dan implementasi (2018; 20) organ perusahaan yang mendukung penerapan mekanisme corporate governance terdiri dari:

1. RUPS (Rapat umum Pemegang Saham)

Menurut undang undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, RUPS adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan atau anggaran dasar perusahaan (Effendi Arief, 2018: 20)

2. Dewan Direksi

Menurut UU no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam ataupun di luar pengendalian, sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dalam hal ini dewan direksi berkewajiban untuk menyusun pedoman perusahaan (Effendi Arief, 2016: 30)

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan pemegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan berperan sebagai pengawas direksi dalam menjalankan perusahaan, serta memastikan agar para manajer bersungguh sungguh dalam bekerja dan memastikan kinerja perusahaan terus meningkat sebagai pencapaian tujuan perusahaan, selain itu dewan komisaris juga berfungsi sebagai penyalaras kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga dewan komisaris diharuskan untuk memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan yang dialami perusahaan tanpa adanya campur tangan dari manajemen, tentunya hal ini didukung dengan adanya informasi yang memadai tentang kinerja keuangan perusahaan, sehingga dewan komisaris mampu mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam penetapan agenda dan strategi perusahaan, selain itu dewan komisaris harus memantau dan memastikan bahwa *good corporate governance* perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan Effendi (2018: 34).

Fungsi dewan komisaris yang dinyatakan dalam *National Code For Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab social dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholder* perusahaan sebagai monitor terhadap efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*, dalam mengatasi hal ini maka dewan komisaris diperbolehkan untuk mengakses data informasi yang terdapat di perusahaan, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan semakin efektif dalam memonitor manajemen (Puspitowati dan Mulya, 2014)

#### 4. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seluruh anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas (Budi et al. 2016)

Berdasarkan peraturan No. 33/POJK.04/2014, mengatur tentang dewan komisaris sebagai berikut:

1. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang dewan komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, 1 diantaranya dewan komisaris independent.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independent wajib paling kuran 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. Satu diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berdasarkan pasal 21 ayat 2 peraturan OJK tersebut, komisaris independent wajib memenuhi prsyarat sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6

bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sehingga komisaris independen di suatu emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.

2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut dan.
4. Tidak mempunyai hubungannya usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

#### 5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang telah dimiliki oleh sebuah institusi (institusi yang dimaksud adalah pemerintah, perusahaan asing dan lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank pendanaan pension) yang terdapat pada suatu perusahaan. tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic*, kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Adanya kepemilikan saham oleh institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal. Institusi pemilik saham akan diasumsikan lebih memperhatikan dan memahami portofolio investasi mereka, sehingga semakin besar kepemilikan institusional dianggap akan meningkatkan motivasi manajer untuk melaporkan laporan keuangan perusahaan dengan laba yang berkualitas ( Puspitowati dan Muliya, 2014 )

#### 6. Kepemilikan Manjerial

Kepemilikan manajerial adalah para pemilik saham yang memiliki kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris. Adanya kepemilikan saham oleh manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan (Setyawan et al, 2017)

## 7. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang telah dipilih oleh para dewan komisaris perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan memonitoring proses pelaporan laporan keuangan perusahaan, dan menjaga kesetabilan pelaporan keuangan sehingga dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Setyawan et al, 2016). Komite audit mempunyai peran yang sangat penting yaitu memelihara kredibilitas pada proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sebuah system pengawasan perusahaan untuk mencapai *good corporate governance*, tugas komite audit melakukan pengawasan untuk meningkatkan epektifitas dalam menciptakan transparansi sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas, dengan dijalankannya fungsi tersebut oleh komite audit, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi (Puspitowati dn Mulya, 2014).

### 2.2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan perusahaan adalah hasil kegiatan perusahaan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan, yang berwujud angka-angka keuangan, yang digunakan sebagai acuan bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi atau tidak (Latuconcina dan Rizal, 2017).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan merupakan hasil dari cerminan kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, laporan keuangan ini merupakan tahapan terakhir dari proses akuntansi dengan tujuan untuk memberi informasi keuangan yang dapat menjelaskan gambaran kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh investor untuk menilai suatu perusahaan dari harga pasar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka akan semakin tinggi return yang akan diperoleh oleh investor, pada umumnya investor akan mencari perusahaan yang mempunyai

kinerja yang baik, sehingga investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Menurut Safi'i (2019) kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari kerja perusahaan yang telah dicapai pada suatu periode tertentu, kinerja tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah rencana kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan tujuan perusahaan sebelumnya, kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki perusahaan,

Analisis laporan keuangan perusahaan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dari analisis bisnis, tujuan analisis tersebut adalah untuk dapat meningkatkan keputusan dan mengevaluasi informasi yang tersedia mengenai laporan keuangan perusahaan.

Analisis keuangan perusahaan terdiri dari tiga bidang utama yaitu analisis profitabilitas, analisis resiko yang terdiri dari penilaian solvabilitas dan likuiditas perusahaan beserta dengan variabilitas labanya dan yang terakhir analisis arus kas (Subramayam. 2017:14)

#### 1. Analisis Profitabilitas

Merupakan evaluasi terhadap hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dan berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat laba serta melibatkan identifikasi dan pengukuran terhadap dampak pengukuran pemicu profitabilitas,

#### 2. Analisis Resiko

Adalah evaluasi mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya, analisis ini meliputi solvabilitas dan liabilitas beserta variabilitas lainnya. Analisis ini sangat penting untuk analisis ekuitas, untuk mengukur keberlanjutan kinerja perusahaan dan untuk menghitung estimasi biaya modal perusahaan.

#### 3. Analisis arus kas

Analisis ini berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh sumber pendanaan dan bagaimana menggunakan dana tersebut, jika perusahaan dalam kegiatan operasinya lebih banyak menggunakan dana atau laba yang diperoleh maka kinerja perusahaan tersebut lebih bagus dari pada perusahaan yang dalam kegiatan operasinya menggunakan dana pinjaman.

Pada penelitian ini, Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari analisis rasio keuangan perusahaan, yaitu Rasio Profitabilitas, Menurut Kadim (2018) Rasio Profitabilitas adalah suatu ukuran yang dinyatakan dalam prosentase yang akan digunakan untuk menilai sudah sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba, atau dapat dikatakan dengan rasio profitabilitas keberhasilan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dapat dilihat, jadi semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka, tingkat kemakmuran pemilik saham akan semakin meningkat. Dengan demikian rasio profitabilitas dipakai para investor untuk menilai keberhasilan dan pertumbuhan kinerja perusahaan, dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diprosikan dengan ROE.

*Return on Equity (ROE)* Dengan adanya rasio *Return on Equity* perusahaan dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola modalnya (kekayaan) secara efektif, semakin tinggi ROE maka pertumbuhan modal perusahaan juga meningkat, karena dengan meningkatnya ROE maka tambahan modal kerja pun bertambah, penambahan modal kerja tersebut dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan laba. (Heikal et al. 2014 )

ROE diperoleh dari Laba bersih (Net Keuntungan) dibagi ekuitas (*Equity*) rasio ini dapat mengukur keuntungan perusahaan dari jumlah investasi dari investor.

$$ROE = \frac{\text{Penghasilan Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 2.3 Hubungan Antara Variabel

### 2.3.1 Hubungan RUPS terhadap Kinerja Keuangan

Rapat umum pemegang saham merupakan organ tertinggi dalam struktur perusahaan, RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak pemegang saham, RUPS memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada dewan komisaris dan direksi. Selain itu RUPS merupakan wadah untuk para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang

berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan perusahaan, menunjuk auditor independent, menentukan alokasi dana perusahaan, dan menentukan kompensasi anggota komisaris, dan direksi. Serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau hal strategis lainnya yang diusulkan oleh direksi (Effendi, 2018:20)

Dalam RUPS semua anggaran perusahaan akan dibahas, RUPS merupakan wadah utama untuk menyatukan keputusan para pemegang saham, dalam RUPS semua keuntungan yang di terima perusahaan akan dibahas, secara umum pemegang saham tentu akan menginginkan rasio profitabilitas yang lebih tinggi, karena angka rasio yang lebih tinggi menunjukkan seberapa besar rupiah yang ditanam investor untuk menghasilkan keuntungan bersih bagi perusahaan, (Lukman, 2018: 61)

### **2.3.2 Hubungan Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan**

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, peran direksi sangat menentukan dalam proses implementasi *good corporate governance*, karena dalam hal ini dewan direksi merupakan organ yang bertugas untuk membuat pedoman perusahaan. Dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan dalam atau luar perusahaan, semakin banyak jumlah dewan direksi maka akan semakin banyak jaringan perusahaan dengan pihak luar akan menjadi lebih baik, hal tersebut akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik.

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dari pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya ( Dewayanto, 2010). Selain itu semakin banyak dewan direksi akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggotanya yang tentunya akan berdampak positif bagi stakeholder, hal ini juga akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik. Hal ini didukung dengan penelitian Rahmawati et al (2017) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **2.3.3 Hubungan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan**

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan informasi laba. Peran dewan direksi mampu memengaruhi pihak manajemen dalam proses penyajian laporan keuangan untuk memperoleh laba yang maksimal. Kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan oleh dewan komisaris, karena manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan oleh adanya dewan komisaris, karena mereka mewakili mekanisme internal untuk mengawasi perilaku yang mengeksploitasi peluang atau keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keuntungan jangka panjang manajemen (Setyawan et al 2017)

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selain itu dewan komisaris juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan, sehingga dewan komisaris harus benar-benar memperhatikan imbal hasil atau keuntungan perusahaan, agar kesejahteraan para pemegang saham terjamin (Effendi, 2018: 35)

Dewan Komisaris sebagai pengawas bagi para manajer, berhak memberikan nasihat kepada manajer terkait keuangan jangka pendek perusahaan, keputusan jangka pendek terutama untuk menjaga likuiditas, agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris akan lebih diawasi dan dapat meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian Rahmawati et al (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **2.3.4 Hubungan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan**

Adanya persaingan perusahaan yang kompetitif, maka perusahaan harus didukung oleh penyajian laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan

yang dapat memperlihatkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, (Santoso, 2017). Kinerja keuangan perusahaan yang baik akan memberikan efek terhadap nilai perusahaan yang tinggi, salah satu cara mendapatkan laba perusahaan yang tinggi adalah dengan memaksimalkan nilai perusahaan, dengan adanya hal tersebut maka diperlukan peran para manajemen yang tidak memihak atau bersifat netral untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengawasan oleh dewan komisaris perusahaan belum semuanya independent, rata-rata banyak perusahaan yang memiliki dewan komisaris independent lebih dari satu periode, hal ini yang membuat keindependennan dewan komisaris diragukan, dewan komisaris perusahaan hendaknya tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebelumnya, selain itu jabatan dewan komisaris independent maksimal hanya 1 periode. (Syafi'i 2018)

Komisaris independent merupakan anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dan pihak-pihak manajemen perusahaan, komisaris harus selalu bertindak independent dan bertindak semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan, status independen tersebut bertanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham yang independen dari praktik kecurangan pasar (Sianipar et al, 2018).

### **2.3.5 Hubungan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan**

Laba akuntansi yang berkualitas dapat didefinisikan sebagai laba yang mempunyai sedikit gangguan persepsi (*perceived noise*) didalamnya. Proposi kepemilikan manajerial yang tinggi akan membuat manajer merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga para manajer akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kemakmurannya (Zerviana et al 2017)

Alasan kepemilikan institusional sebagai proxy struktur kepemilikan karena, perusahaan memiliki sumber daya yang lebih besar, dibandingkan dengan pemilik saham lainnya, sehingga dapat menguasai mayoritas saham, konsentrasi kepemilikan dianggap memiliki kekuatan untuk mengendalikan keputusan manajemen. Kepemilikan institusional yang terkonsentrasi juga dapat

menimbulkan konflik keagenan, antara pemilik mayoritas dan minoritas, karena manajer akan bertindak sesuai dengan pemilik mayoritas (Syafi'i 2018)

Kepemilikan institusional merupakan keadaan dimana suatu institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan, institusi tersebut misalnya pemerintah, swasta atau pihak asing, kepemilikan institusional akan menyebabkan para manajer termotivasi untuk bekerja lebih semangat untuk meningkatkan kinerja perusahaan, selain itu para manajer akan lebih berhati-hati dalam menentukan pendanaan perusahaan (Sianipar et al, 2018)

### **2.3.6 Hubungan kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan**

Minat manajer untuk memiliki saham perusahaan, dimana manajer sekaligus menjadi pengurus semakin menurun. Manajer masih mengandalkan memperoleh keuntungan dari perannya sebagai manajer perusahaan dibandingkan peranannya sebagai pemegang saham, prosentase kepemilikan saham oleh manajer biasanya sedikit nilainya, semakin kecil prosentase kepemilikan saham oleh manajer maka hak pengendalian perusahaan semakin kecil. Sedangkan dalam posisinya sebagai manajer, jika kinerja manajer membaik dan tercermin melalui laporan keuangan, manajer akan memperoleh lebih banyak bonus dan keuntungan dibandingkan dengan hak yang diperolehnya sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris, adanya kepemilikan saham oleh manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai prosentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan (Setyawan et al, 2018).

Berdasarkan teori keagenan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham akan mengakibatkan terjadinya konflik antara keduanya, konflik tersebut disebut *agency conflict*, maka untuk menjegah supaya tidak terjadi konflik tersebut perlu adanya pemusatan kepemimpinan, kepemilikan manajerial dianggap mampu untuk menyatukan kedua kepentingan tersebut. Jumlah rata-rata kepemilikan manajerial yang kecil di setiap perusahaan, membuat manajer di

setiap perusahaan hanya berperan sebagai wakil dari para pemilik mayoritas, selain itu manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik saham. Syafi'I (2018).

Manajer harus mengetahui posisi keuangan perusahaan pada saat ini, bagaimana potensi usaha perusahaan, bagaimana kebutuhan pendanaan perusahaan, jika tidak memungkinkan apakah harus dilakukan hutang atau perusahaan harus berinvestasi. Pihak manajer memiliki fungsi dalam perusahaan yang berhubungan dengan keputusan investasi yang akan dijalankan oleh perusahaan, agar perusahaan memperoleh imbal hasil (retur) yang sepadan. (Lukman, 2018: 18 )

### **2.3.7 Hubungan Komite Audit dengan kinerja Keuangan**

Komite audit sebagai pihak yang independent yang diberi tugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan akan mengurangi gangguan dalam informasi laba oleh karena itu, pasar diduga akan beraksi lebih kuat atas laporan Laba yang dilaporkan. Independensi komite audit merupakan faktor utama, anggota komite audit yang independent akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Karena semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan akan semakin baik dengan peran komite audit mampu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ( Santoso, 2017 )

Dalam praktek penerapan *Good corporate governance*, peran komite audit sangat penting karena komite audit merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka proses pengawasan perusahaan. Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas, agar komite audit terhindar dari konflik kepentingan. Jumlah keanggotaan komite audit menurut Direksi Bursa efek Jakarta (BEJ) No.Kep 315/BEJ/06/200. Jumlahnya harus sekurang kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, satu diantaranya merupakan komisaris independent yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas dibantu dengan adanya komite audit yang menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh suatu

pengawasan internal maupun eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, (Effendi, 2018: 51). Maka semakin banyak jumlah komite audit, maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data data perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat, hal ini didukung dengan penelitian Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Menurut Sugiona (2017;63), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir, hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti jawabannya.

Berdasarkan hubungan antar variabel diatas, maka dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

H. 1 : RUPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan(ROE)

H. 2 : Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan(ROE)

H. 3 : Komisaris Berpengaruh terhadap kineeja kuangan (ROE)

H. 4 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh terhadap kinerja keuangan(ROE)

H.5 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap kinerja kuangan (ROE)

H.6 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja kuangan (ROE)

H.7 : Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja kuangan (ROE)

## 2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang biasanya digunakan sebagai alat pendekatan pemecahan masalah, kerangka konseptual membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Rompas, 2013 )

Gambar 2.1 Kerangka konseptual Penelitian

